



PERAN SEKOLAH KELAS II DALAM PEMBENTUKAN STRUKTUR SOSIAL PADA MASA KOLONIAL

Anita¹

¹Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores

anitazafana@gmail.com

Abstrak

Abstrak

Sekolah Kelas II tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial dan pembentuk struktur sosial kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekolah Kelas II dalam pembentukan dan pelestarian struktur sosial pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah Kelas II merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial dan diperuntukkan bagi masyarakat pribumi dari golongan rakyat biasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, melalui studi pustaka terhadap buku, arsip, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan sejarah pendidikan dan struktur sosial kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Kelas II berfungsi sebagai instrumen kebijakan kolonial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat rendah dalam sistem administrasi dan ekonomi kolonial. Kurikulum yang bersifat terbatas dan praktis mengarahkan peserta didik agar memiliki keterampilan dasar, namun tidak memberikan kesempatan yang luas untuk mobilitas sosial. Dengan demikian, Sekolah Kelas II berperan dalam mempertahankan struktur sosial kolonial yang hierarkis dan diskriminatif, di mana masyarakat pribumi tetap berada pada lapisan sosial terbawah. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberadaan Sekolah Kelas II secara tidak langsung membuka akses awal terhadap pendidikan formal bagi masyarakat pribumi. Kemampuan baca tulis yang diperoleh menjadi modal penting bagi tumbuhnya kesadaran sosial dan perubahan masyarakat pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, Sekolah Kelas II memiliki peran ganda, yaitu sebagai alat pelanggeng struktur sosial kolonial sekaligus sebagai awal transformasi sosial di kalangan pribumi.

Abstract

Class II schools not only function as educational institutions, but also as tools for social engineering and the formation of colonial social structures. This study aims to analyze the role of Class II Schools in the formation and preservation of social structures during the colonial period of the Dutch East Indies. Class II Schools were educational institutions run by the colonial government and intended for indigenous people from the common people. This study uses a qualitative research method with a historical approach, through a literature review of books, archives, and scientific journals relevant to the history of education and colonial social structures. The results show that Class II Schools functioned as an instrument of colonial policy to meet the need for low-level labor in the colonial administrative and economic system. The limited and practical curriculum directed students to acquire basic skills, but did not provide broad opportunities for social mobility. Thus, Class II Schools played a role in maintaining a hierarchical and discriminatory colonial social structure, in which indigenous people remained at the bottom of the social ladder. However, this study also found that the existence of Class II Schools indirectly opened early access to formal education for indigenous people. The literacy skills acquired became important capital for the growth of social awareness and societal change in the future. Therefore, Class II Schools have a dual role, namely as a tool for perpetuating the colonial social structure and as the beginning of social transformation among the natives.

Article Info

Naskah diterima: 1 Oktober 2025,

Naskah direvisi: 1 Novembert 2025,

Naskah disetujui: 30 Desember 2025

Keywords
Sekolah Kelas II,
Pendidikan Kolonial,
Struktur Sosial,
Hindia Belanda.

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan kolonial Belanda di Hindia Belanda dirancang bukan semata-mata untuk kebutuhan pendidikan, tetapi sebagai instrumen politik untuk mempertahankan struktur sosial yang hierarkis. Pendidikan dijadikan alat untuk membentuk masyarakat sesuai kepentingan kolonial, terutama dalam menciptakan tenaga kerja pribumi yang terampil secara minimal namun tetap berada dalam kontrol kekuasaan kolonial (Gouda, 1995). Dalam konteks inilah Sekolah Kelas II (Tweede Klasse School) memperoleh perannya sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak pribumi dari golongan bawah.

Sekolah Kelas II memiliki kurikulum yang berbeda secara signifikan dibandingkan sekolah untuk golongan elite, seperti Sekolah Kelas I atau Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Materi pelajaran di Sekolah Kelas II dibatasi pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta pelatihan praktis yang diarahkan untuk pekerjaan tingkat rendah dalam administrasi kolonial (Kartodirdjo, 1987). Pembatasan kurikulum tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kolonial tidak netral, melainkan sebuah mekanisme untuk mempertahankan ketidaksetaraan sosial, sebagaimana digambarkan Furnivall (1939) dalam analisisnya mengenai ekonomi dan masyarakat plural di Hindia Belanda.

Perbedaan jenis sekolah mencerminkan struktur sosial kolonial yang membagi masyarakat menjadi tiga kelompok besar: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Stratifikasi pendidikan ini mempertegas stratifikasi sosial karena akses pendidikan yang berbeda menciptakan posisi sosial yang berbeda pula (Taylor, 2003). Sekolah Kelas II berperan dalam melahirkan kelompok sosial baru: pribumi berpendidikan rendah yang kemudian mengisi jabatan seperti guru bantu, juru tulis, pegawai desa, atau tenaga administratif rendah lainnya. Kelompok ini berada di antara rakyat biasa dan elite terdidik lulusan sekolah-sekolah Barat, sebuah fenomena yang turut memengaruhi hubungan sosial pada masa kolonial (Sutherland, 1979).

Dengan demikian, Sekolah Kelas II tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial dan pembentuk struktur sosial kolonial. Dampaknya tidak berhenti pada masa

kolonial, melainkan turut mempengaruhi mobilitas sosial dan ketimpangan pendidikan pada masa Indonesia modern. Mengkaji peran Sekolah Kelas II menjadi penting untuk memahami bagaimana kolonialisme membentuk warisan sosial yang masih berpengaruh hingga saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai sumber ilmiah terkait sistem pendidikan kolonial Belanda serta peran Sekolah Kelas II dalam struktur sosial Hindia Belanda. Metode ini dipilih karena penelitian bersifat historis dan memerlukan penelusuran terhadap dokumen tertulis yang telah diterbitkan, seperti buku sejarah, arsip kebijakan kolonial, dan artikel akademik (Bowen, 2009).

Langkah-langkah Umum Melakukan Kajian Literatur

1. Identifikasi Kata Kunci: Tentukan istilah kunci terkait topik penelitian.
2. Pencarian Sumber: Gunakan basis data akademik (Google Scholar, Scopus, Science Direct) untuk mencari jurnal, buku, dan artikel relevan.
3. Penyaringan dan Seleksi: Tetapkan kriteria inklusi/eksklusi (tahun terbit, jenis studi, bahasa) untuk memilih sumber berkualitas.
4. Analisis dan Evaluasi: Baca dan analisis secara kritis sumber yang terpilih, identifikasi teori, temuan utama, metodologi, dan kesenjangan.
5. Sintesis dan Penulisan: Gabungkan temuan dari berbagai sumber untuk membentuk argumen, kerangka teori, dan mengidentifikasi ruang kosong penelitian baru, lalu tulis dalam bab kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekolah Kelas II sebagai Bagian dari Sistem Pendidikan Kolonial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Kelas II tidak dapat dipisahkan dari sistem struktur sosial kolonial yang bersifat diskriminatif. Pendidikan pada masa kolonial berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat pribumi. Hal ini sejalan dengan pendapat Freire (1970) yang menyatakan bahwa pendidikan dapat menjadi alat penindasan apabila digunakan

untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Sekolah Kelas II secara nyata mencerminkan ketimpangan sosial dalam akses pendidikan. Pribumi kelas bawah hanya diberikan pendidikan dasar yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kolonial, tanpa peluang untuk meningkatkan status sosialnya. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam mereproduksi struktur sosial yang timpang, bukan mengubahnya.

Selain itu, keberadaan Sekolah Kelas II memperkuat pembagian kerja dalam masyarakat kolonial. Pribumi lulusan sekolah ini diarahkan untuk menjadi pegawai rendah, sementara jabatan strategis tetap dikuasai oleh bangsa Eropa. Hal ini sesuai dengan teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Soekanto (2007), bahwa sistem sosial yang tertutup akan membatasi mobilitas sosial anggotanya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa Sekolah Kelas II memiliki dampak tidak langsung yang bersifat transformatif. Kemampuan baca tulis yang diperoleh sebagian pribumi menjadi modal awal dalam perkembangan kesadaran sosial dan politik. Menurut Anderson (2008), penyebaran pendidikan modern, meskipun terbatas, turut berkontribusi pada lahirnya kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat terjajah.

Pembentukan struktur sosial pada masa kolonial tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pendidikan Belanda. Melalui sistem sekolah berjenjang, pemerintah kolonial menciptakan kelas-kelas sosial baru yang mendukung keberlangsungan kekuasaan. Sekolah Kelas II menjadi salah satu instrumen utama dalam menata ulang struktur masyarakat pribumi. Reorganisasi 1892 menciptakan dua jenis sekolah, sekolah kelas satu terutama bagi anak golongan atas dan sekolah kelas dua untuk orang biasa. Sekolah kelas satu yang lamanya 5 tahun mempunyai kurikulum yang lebih luas daripada sekolah kelas dua yang hanya mempunyai kurikulum yang sederhana, yakni meliputi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah kelas dua dimaksud sebagai sekolah rakyat memberi pendidikan sederhana bagi seluruh rakyat.

Nama sekolah kelas dua tidak berkembang menjadi sekolah umum bagi seluruh rakyat kemudian dipersoalkan apakah sekolah itu memang paling sesuai untuk pendidikan rakyat umumnya. Perubahan pandangan timbul karena perkembangan

sekolah ini yang tak diduga sebelumnya. Walaupun lama sekolah ini pada tahun 1893 ditetapkan 3 tahun, masih terbuka kemungkinan untuk memperluas programnya berdasarkan rekomendasi komisi sekolah dan persetujuan inspektur.

Oleh sebab programnya diperluas dan sekolah ini menjadi sama dengan sekolah kelas satu maka pemerintah tidak dapat memikul akibat finansial dan sosial politik jenis sekolah serupa ini sebagai sekolah umum bagi seluruh rakyat. Keuangan pemerintah tidak mengizinkan pengeluaran yang demikian banyak. Keberatan lain ialah bahwa perluasan sekolah kelas dua yang cepat menimbulkan bahaya terbentuknya sejumlah besar manusia yang menjauhkan diri dari kehidupan desa dan pekerjaan kasar yang menginginkan pekerjaan kantor dan pemerintahan. Dirisaukan akan terbentuknya kelompok intelektual yang menderita frustrasi yang dapat membahayakan pemerintahan Belanda. Alasan yang sama diperdengarkan kemudian berkenan dengan HIS, Mulo dan pendidikan Tinggi, suatu sikap yang menghalangi perkembangan pendidikan di Indonesia selama penjajahan Belanda.

Dengan alasan itu maka sekolah kelas dua dianggap tidak serasi bagi pendidikan umum bagi seluruh rakyat. Maka dari itu harus dicari jenis sekolah lain untuk penduduk pada umumnya yang tidak mengharapkan pekerjaan kantor dan tidak mengasingkan orang dari lingkungan aslinya. Pada tahun 1907 Gubernur Jenderal Van Heuts menemukan kembali sekolah desa yang didirikan, dipelihara, dan dibiayai, sekalipun dalam teorinya, oleh masyarakat Desa, yang dapat memberikan pendidikan secara besar-besaran dengan biaya yang sekecil kecilnya.

Dengan didirikannya sekolah Desa maka terjadi perubahan dalam Fungsi sekolah kelas dua. Sekolah ini tidak lagi menjadi lembaga pendidikan untuk rakyat pada umumnya melainkan hanya untuk sebagian kecil saja. Sekolah ini akan mempersiapkan berbagai ragam pegawai rendah untuk kantor pemerintahan dan perusahaan swasta. Akhirnya sekolah ini juga berfungsi untuk mempersiapkan guru bagi sekolah Desa. Sekolah ini menjadi lembaga pendidikan golongan elite dikalangan golongan rendah, hampir seperti kedudukan sekolah kelas satu sewaktu mula mula dibuka pada tahun 1893 dan hanya didirikan di kota-kota yang dianggap penting. Gubernur Jenderal Dewan Hindia tidak memandang

sekolah kelas dua ini layak bagi pendidikan petani dan nelayan karena itu tak perlu disebarluaskan seperti halnya dengan sekolah desa. Namun direktur pendidikan dan juga serikat Islam mendukung perluasan sekolah itu dan pada tahun 1914 disetujui untuk menambah 60 sekolah kelas dua setiap tahun.

Setelah 1908 jumlah sekolah ini bertambah dengan 60 buah setahun di Jawa dan 20 buah di luar Jawa dan pada tahun 1909 untuk pertama kali dalam sejarah jumlah sekolah pemerintah di Jawa melebihi jumlah sekolah di luar Jawa. Sejak itu Jawa senantiasa menunjukkan dominasi dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1920 jumlah sekolah di Jawa telah dua kali lipat jumlahnya dari luar Jawa. Ini sesuai dengan salah satu tujuan reorganisasi 1892, yakni menyebarkan pendidikan menurut pentingnya suatu daerah. Karena itu pendidikan tidak merata di kepulauan kita ini.

Sekolah Kelas Dua selanjutnya merupakan sekolah bagi minoritas penduduk. Hanya sekitar 4% dari anak-anak mendapat tempat di sekolah itu dan tiap tahun banyak murid yang harus ditolak karena ketiadaan tempat. Karena alasan finansial dan politik sosial, pemerintah Belanda tak bersedia untuk menyebarluaskan sekolah serupa ini. Khususnya setelah tahun 1927 sekolah ini menggantikan *Vervoghschool*, sekolah yang memberi tujuan pendidikan selama dua tahun bagi lulusan sekolah Desa. Sekolah Desa disambung dengan sekolah lanjutan (*Vervoghschool*) yang menyajikan program yang sama seperti sekolah kelas dua. Sistem ini lebih murah dan lagi pula membuka kesempatan bagi anak-anak desa untuk melanjutkan pelajarannya. Batas-batas antara sekolah desa dengan sekolah sambungan (*Vervoghschool*) lambat laun lenyap. Antara kedua jenis sekolah, yang sedianya sama sekali tak ada pertaliannya pada masa lampau terjalin hubungan erat. Sekolah desa dibebaskan dari isolasi.

2. Karakteristik dan Kurikulum

Kurikulum Sekolah Kelas II bersifat terbatas dan fungsional. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi membaca, menulis, berhitung, serta pembentukan sikap disiplin dan kepatuhan. Kartodirdjo (1992) menyatakan bahwa pendidikan kolonial dirancang agar tidak menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan pribumi, sehingga potensi perlawanan terhadap kolonialisme dapat ditekan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Kelas II tidak dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini membatasi kesempatan mobilitas sosial bagi masyarakat pribumi.

Fitur	Deskripsi
Lama Pendidikan	3 tahun (sangat singkat, berbeda dengan HIS yang 7 tahun atau Sekolah Kelas I yang 5 tahun).
Lokasi Penyebaran	Banyak didirikan di daerah distrik-distrik dan pelosok desa (sehingga juga disebut Sekolah Rakyat atau <i>Volksschool</i> , meskipun terkadang <i>Volksschool</i> berada di tingkatan yang lebih rendah).
Bahasa Pengantar	Menggunakan Bahasa Melayu atau bahasa daerah setempat, bukan bahasa Belanda.
Mata Pelajaran	Meliputi mata pelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung (matematika dasar), menggambar, geografi, ilmu alam, dan menyanyi. Bahasa Belanda biasanya diajarkan sebagai mata pelajaran pengetahuan, bukan sebagai bahasa pengantar.
Diskriminasi	Tingkat pendidikan dan fasilitasnya secara signifikan lebih rendah dibandingkan sekolah untuk anak-anak Eropa (ELS) atau anak-anak pribumi elit (HIS), mencerminkan sistem pendidikan yang diskriminatif pada masa kolonial.

Menurut Statuta 1983 Program Sekolah Kelas Dua terdiri setidaknya-tidaknnya atas pelajaran membaca, menulis dalam bahasa melayu dan berhitung. Pelajaran agama dilarang walaupun ruangan kelas dapat digunakan untuk pendidikan agama di luar jam sekolah, karena sekolah ini semula dimaksud untuk seluruh rakyat, maka kurikulumnya sederhana. Namun ada kemungkinan memperluas kurikulum itu atas persetujuan inspektur dengan ketentuan

bahwa bahasa Belanda tidak boleh diajarkan. Karena kemungkinan memperluas kurikulum maka segera timbul usaha menambah mata pelajaran sehingga akhirnya menjadi sama dengan program Sekolah Kelas satu dan pada tahun 1895 dikeluarkan pertauran bahwa program sekolah kelas dua sama dengan program sekolah kelas satu 1-3.

Pengajaran bahasa senantiasa merupakan masalah karena banyaknya bahasa daerah. Kebanyakan anak pada waktu itu hanya mengenal bahasa ibunya saja. Rasanya tidak mungkin mendidik guru dalam tiap bahasa daerah yang lebih dari 200 buah atau menyediakan buku pelajarannya. hanya $\pm$ 20 bahasa daerah dianggap cukup banyak digunakan dan dapat dijadikan bahasa pengantar di sekolah. Di daerah lain menggunakan bahasa melayu.

Pekerjaan tangan menjadi masalah pengajaran yang ramai diperbincangkan. Usaha untuk memasukkannya sebagai mata pelajaran banyak menerima tantangan karena dianggap tidak layak dipelajari di sekolah karena dapat diberikan di rumah, tidak dapat menghasilkan sesuatu yang dapat diperdagangkan, dan tidak menarik perhatian orang yang pergi sekolah justru untuk mengelakkan pekerjaan kasar dan mendapatkan pekerjaan kantor.

Sampai 1914 Sekolah kelas Dua dan Sekolah kelas satu di bawah Inpeksi yang sama akan tetapi setelah bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran di Sekolah kelas Satu, dan kemudian diubah menjadi HIS maka sekolah ini di bawah infeksi pendidikan Barat. Dengan demikian terbentuklah jurang antara kedua jenis sekolah ini yang tidak dapat dijembatani. Sebelumnya masih ada kemungkinan seorang berpindah dari sekolah kelas Dua ke Sekolah kelas Satu. Guru-guru berijazah KweekSchool berusaha ditempatkan di Sekolah Kelas Satu yang lebih terhormat. Dengan dikurangnya guru-guru yang baik dari sekolah Kelas Dua merosot pula mutu sekolah itu. Tempat mereka diduduki oleh guru yang kurang atau tidak kompeten.

3. Hubungan Sekolah Kelas II dengan Struktur Sosial Kolonial

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi literatur terhadap sumber-sumber sejarah pendidikan kolonial di Hindia Belanda, ditemukan bahwa Sekolah Kelas II memiliki hubungan yang sangat erat dengan struktur sosial kolonial yang bersifat hierarkis dan diskriminatif. Sistem pendidikan kolonial

dirancang tidak untuk mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial.

Sekolah Kelas II diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dari kalangan rakyat biasa. Berbeda dengan Sekolah Kelas I yang ditujukan bagi golongan Eropa dan elite pribumi, Sekolah Kelas II memiliki kurikulum yang lebih sederhana dan menekankan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini sejalan dengan teori stratifikasi sosial kolonial yang menyatakan bahwa pendidikan digunakan sebagai alat pembeda status sosial. Menurut Sartono Kartodirdjo, "*pendidikan kolonial tidak dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan, tetapi untuk menyesuaikan kebutuhan administrasi dan ekonomi kolonial*" (Kartodirdjo, 1993).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Kelas II diarahkan untuk mengisi posisi rendah dalam struktur pemerintahan dan ekonomi kolonial, seperti juru tulis, pegawai rendahan, atau tenaga kerja kasar terampil. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangat terbatas, sehingga mobilitas sosial kaum pribumi tetap terhambat. Hal ini memperkuat struktur sosial kolonial yang menempatkan bangsa Eropa di lapisan atas, elite pribumi di lapisan menengah, dan rakyat pribumi di lapisan bawah.

Selain itu, bahasa pengantar yang digunakan di Sekolah Kelas II umumnya adalah bahasa daerah atau Melayu rendah, bukan bahasa Belanda. Menurut Furnivall, "*penggunaan bahasa dalam pendidikan kolonial menjadi salah satu sarana untuk menjaga jarak sosial antara penguasa dan yang dikuasai*" (Furnivall, 1944). Dengan demikian, kebijakan bahasa turut mempertegas batas sosial dalam masyarakat kolonial.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sekolah Kelas II tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial kolonial. Keberadaannya berfungsi sebagai instrumen kolonial untuk mempertahankan ketimpangan sosial dan memastikan ketersediaan tenaga kerja pribumi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah kolonial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sekolah Kelas II memiliki peran penting dalam pembentukan dan pelestarian struktur

Anita, Peran, Sekolah, Kelas, II.....

sosial pada masa kolonial. Sekolah ini dirancang khusus bagi masyarakat pribumi dari kalangan rakyat biasa dengan tujuan memberikan pendidikan dasar yang terbatas, sehingga tidak membuka peluang mobilitas sosial yang luas. Melalui kurikulum yang sederhana, penggunaan bahasa pengantar non-Belanda, serta pembatasan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Sekolah Kelas II berfungsi sebagai alat kolonial untuk menyiapkan tenaga kerja pribumi tingkat rendah. Dengan demikian, pendidikan tidak digunakan sebagai sarana pemerataan sosial, melainkan sebagai instrumen untuk mempertahankan hierarki sosial yang menempatkan bangsa Eropa di lapisan atas, elite pribumi di lapisan menengah, dan rakyat pribumi di lapisan bawah. Oleh karena itu, Sekolah Kelas II berperan dalam memperkuat ketimpangan sosial dan menjaga keberlangsungan sistem kolonial, sehingga pendidikan pada masa kolonial lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan daripada upaya mencerdaskan masyarakat secara menyeluruh.

PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan selama proses penulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

- Anderson, B. (2008). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- Furnivall, J. S. (1944). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Furnivall, J. S. (1939). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Gouda, F. (1995). *Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900–1942*. Amsterdam University Press.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, S. (Sejarah Pendidikan Indonesia). 1987. Menyajikan perbandingan rinci antara kurikulum dan tujuan Sekolah Kelas I, Kelas II, dan HIS.
- Nasution, S. (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ricklefs, M. C. (A History of Modern Indonesia since c. 1200). Cambridge University Press. Memberikan konteks luas mengenai implementasi Politik Etis dan dampaknya pada pendidikan.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutherland, H. (1979). "The Priyayi Class." *Indonesia Journal*.
- Taylor, J. G. (2003). *Indonesian Social History: An Introductory Reader*. Ohio University Press.
- Jurnal Pendidikan dan Sejarah (Misalnya, Jurnal UNY, Jurnal Unesa). Berbagai artikel yang mengkaji kebijakan *Dualistisch Onderwijs Stelsel* (Sistem Pendidikan Dualistik) dan diskriminasi di dalamnya.
- Publikasi Pemerintah Kolonial (*Staatsblad/Staatsblad van Nederlandsch-Indië*). Dokumen resmi yang menetapkan durasi, mata pelajaran, dan peruntukan Sekolah Kelas II sebagai pendidikan rakyat jelata.